

Peran Widyaiswara Dalam Meningkatkan Pembangunan Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan)

The Role of Widyaiswara in Enhancing Educational Development in 3T Regions (Underdeveloped, Outermost, and Frontier)

Veri Mei Hafnizal¹, Rinaldi^{2*}

^{1,2} Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja Lembaga Administrasi Negara,
*rinaldi.athal@gmail.com

Submitted: 14-03-2025

Accepted: 30-06-2025

Published: 01-08-2025

Abstrak: Kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) penting diperankan lebih nyata bagi Widyaiswara untuk membumikan program Visi Indonesia Emas 2045 dimana pemerintah perlu memposisikan pendekatan pembangunan reformatif menjadi transformatif dalam bentuk transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Desember tahun 2024 melalui metode kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Widyaiswara berperan penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi tenaga pendidik dan peserta didik melalui program pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan pendidikan. Disisi lain, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, akses transportasi, serta pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kondisi dan budaya lokal.

Kata kunci: Widyaiswara, Guru, daerah 3T, pendidikan, pembangunan

Abstract: The quality of education in underdeveloped, outermost, and frontier (3T) regions requires a more concrete contribution from Widyaiswara to support the realization of the Golden Indonesia Vision 2045. This vision urges the government to shift its development paradigm from a reformative to a transformative approach, encompassing economic, social, and governance transformation. This research was conducted from May to December 2024 using a descriptive-analytical qualitative method with a conceptual approach. The findings indicate that Widyaiswara play a crucial role in strengthening human resource capacity, particularly among educators and students, through training programs, mentoring, and educational empowerment initiatives. However, several challenges persist, including inadequate educational infrastructure, limited transportation access, and the need for more adaptive learning approaches aligned with local conditions and cultural contexts.

Keywords: Widyaiswara, teacher, 3T regions, education, development

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan besar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan memiliki berbagai keragaman yang sangat luar biasa dalam berbagai hal seperti etnis, budaya, dan bahasa. Selain itu, Indonesia juga memainkan peran penting di kancah internasional, terutama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan perdagangan internasional. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia aktif berkontribusi dalam berbagai organisasi internasional, termasuk *Association of Southeast Asian Nations*

(ASEAN) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Secara geografis, wilayah Indonesia yang membentang dari barat hingga timur memiliki keunikan tersendiri, menciptakan berbagai kategori wilayah, seperti pusat kota, kota satelit, daerah pegunungan, pesisir, pelosok, dan daerah terpencil. Di tengah keberagaman geografis ini, terdapat wilayah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Daerah 3T merupakan kawasan yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya

Author(s). (2025). Monas: Jurnal Inovasi Aparatur, 7(1), page 61-70

<https://doi.org/10.54849/monas.v7i1.269>

© The Author(s)



Published by Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

pembangunan nasional karena menghadapi tantangan sosial ekonomi yang kompleks. Wilayah ini umumnya memiliki kondisi infrastruktur yang terbatas, akses layanan dasar yang minim, serta tantangan geografis yang menyebabkan jauh dari akses ke pusat-pusat ekonomi utama.

Masyarakat di wilayah 3T tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga ketimpangan pembangunan yang signifikan. Pembangunan yang tidak merata berdampak pada berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Beberapa permasalahan utama yang sering ditemui di daerah 3T meliputi rendahnya mutu pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas (Rira, 2023). Sarana dan prasarana pendidikan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke tanpa pengecualian. Namun, kenyataannya ketersediaan fasilitas pendidikan masih belum merata, terutama di daerah 3T. Hal ini semakin memperlebar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembangunan sumber daya manusia di masa depan (Jakaria et al., 2019).

Ada dua faktor utama yang menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini masih kurang berhasil. Pertama, strategi pembangunan pendidikan lebih bersifat *input-oriented*, yang lebih menitikberatkan pada penyediaan sarana tanpa memperhatikan efektivitas implementasi di lapangan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur secara sentral oleh birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak kebijakan yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak berjalan efektif di tingkat mikro (sekolah) (Putera & Rhussary, 2018).

Permasalahan pendidikan yang tidak merata mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai terobosan guna mengatasi kesenjangan tersebut dan meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih merata. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan regulasi sebagai payung hukum yang memungkinkan pemerintah menjalankan pembangunan dengan dasar perlindungan hukum yang kuat. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa daerah tertinggal adalah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala

nasional (Kemensetneg, 2020). Lebih lanjut, peraturan ini menetapkan bahwa terdapat 62 daerah yang masuk dalam daftar daerah tertinggal untuk periode 2020-2024. Regulasi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah 3T.

Kembali kepada pandangan dan filosofi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan utama negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih jauh dari harapan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Daerah 3T masih mengalami keterbelakangan dalam hal kualitas pendidikan akibat berbagai kendala, seperti minimnya tenaga pendidik, pembangunan sarana pendidikan yang belum optimal, sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan, kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang, serta mobilitas sosial yang terbatas (Faruqi Tutukansa & Dwi Tuffahati, 2022).

Seiring dengan berkembangnya era Revolusi Industri 4.0 menuju Revolusi Industri 5.0, di mana teknologi informasi dan *Artificial Intelligence* (AI) semakin berperan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Jika sektor pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) tidak dijadikan prioritas dalam pembangunan, kesenjangan pendidikan di wilayah tersebut akan semakin melebar dan berisiko membuat daerah 3T semakin tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik khususnya Widyaiswara (WI) terhadap daerah 3T agar dapat terus memupuk harapan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Widyaiswara, sebagai fasilitator pembelajaran, memainkan peran strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur negara dan memastikan implementasi kebijakan pendidikan berjalan efektif di daerah 3T. Selain melatih aparatur negara, Widyaiswara juga dapat berkolaborasi dengan tenaga pendidik lainnya, seperti Guru, yang berada di garis depan dalam pemenuhan pendidikan dasar. Oleh karena itu, optimalisasi peran Widyaiswara melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah penting dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah 3T.

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah 3T, termasuk

Program Indonesia Pintar dan Dana Alokasi Khusus Pendidikan. Namun, efektivitas implementasi program-program tersebut masih menjadi perdebatan. Sementara banyak penelitian lebih berfokus pada peran Guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T, kajian mengenai kontribusi Widyaiswara masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis Widyaiswara dalam pembangunan pendidikan di daerah 3T, menganalisis tantangan yang dihadapi Widyaiswara, serta menawarkan solusi strategis guna mengoptimalkan kontribusi Widyaiswara dalam pemerataan pendidikan di daerah 3T. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang lebih merata, tidak hanya untuk menjembatani kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal, tetapi juga untuk memperkuat persatuan dan keadilan sosial di seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual. Dengan spesifikasi penulisan yang bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha memunculkan data dan menilai serta menganalisis permasalahan yang muncul berdasarkan kajian akademik. Data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder memfokuskan kepada studi kepustakaan yang diambil dari bahan primer antara lain peraturan perundang-undangan terkait pendidikan dan kebijakan daerah 3T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teoritis

Masyarakat di daerah tertinggal di Indonesia secara geografis terletak jauh dari pusat-pusat kemajuan dan perkembangan. Secara sistemik, mereka juga berada dalam posisi marjinal, di mana secara *de jure* atau formal mereka merupakan bagian dari sistem nasional, tetapi secara *de facto*, banyak dari mereka masih berada di luar jangkauan layanan publik yang memadai. Tidak mengherankan jika keterbelakangan dan kemiskinan menjadi salah satu ciri utama masyarakat di daerah tertinggal yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka (Kuliawati & Radjasa, 2019).

Pada era dimana teknologi mengubah tatanan masyarakat secara mendalam, pendidikan sebagai elemen esensial dalam

kehidupan manusia turut terpengaruh. Perubahan ini membawa paradigma baru dalam metode pembelajaran, memperkenalkan inovasi dalam menyelenggarakan pendidikan (Maulido et al., 2024). Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan yang diterapkan di tingkat pusat, daerah, dan sekolah. Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, diperlukan pengelolaan yang baik serta penerapan standar pendidikan nasional agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Salah satu aspek strategis yang harus diperhatikan adalah masih rendahnya kualitas sekolah, yang sebagian besar dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas pendidikan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa pakar salah satunya adalah (Pribadi, 2017), permasalahan pendidikan di beberapa daerah yang jauh dari ibu kota cukup kompleks. Masih banyak bangunan sekolah yang tidak layak, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kerusakan pada bangunan dan kurangnya fasilitas, seperti buku dan tenaga pendidik, turut menjadi kendala serius beberapa daerah di Indonesia (Maulido et al., 2024). Pendidikan di daerah terpencil menjadi aspek fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak bangsa. Namun, hingga kini, masih banyak masyarakat di daerah perbatasan, pedalaman, dan terpencil yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Kondisi ini berdampak langsung pada stagnasi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan pembangunan sektor pendidikan merata hingga ke daerah pedalaman guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia (Abduh et al., 2022).

Mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu input, proses, dukungan lingkungan, serta sarana dan prasarana. Input mencakup kondisi peserta didik, seperti minat, bakat, potensi, motivasi, dan sikap. Proses berkaitan erat dengan penciptaan suasana pembelajaran, yang dalam hal ini lebih banyak ditekankan pada kreativitas pengajar (guru). Dukungan lingkungan meliputi peran keluarga, masyarakat, serta faktor sosial lainnya yang turut mendukung keberhasilan pendidikan. Sedangkan sarana dan prasarana adalah perangkat yang dapat memfasilitasi aktivitas pembelajaran, seperti gedung, alat-alat

laboratorium, komputer dan sebagainya (Prihantoro, 2011, dikutip dalam Asiska & Nurmahmudah, 2022).

Dalam konteks tenaga pendidik, terdapat fenomena unik yang disebut *metrocentricity*, yaitu kecenderungan Guru untuk lebih berorientasi pada sistem pendidikan di perkotaan dan kurang mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan pendidikan di daerah terpencil. Campbell dan Yates (2011) mendefinisikan *metrocentricity* sebagai “*a personal trait inhibiting teachers from considering country positions*”, yang menunjukkan bahwa banyak Guru lebih memilih mengajar di wilayah perkotaan dibandingkan di daerah tertinggal dan terpencil (Rahmadi Fitri Imam, 2020).

Gambaran Umum Pendidikan Daerah 3T

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun sekolah. Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, aspek pengelolaan yang baik serta penerapan standar nasional menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Rendahnya kualitas sekolah menjadi tantangan utama yang harus diatasi terutama dalam penguatan kebijakan, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor penyebabnya, seperti minimnya kualitas sarana dan prasarana (Andi Nur Fadillah & Suljumansah, 2021).

Sesuai dengan penjelasan di atas maka Widyaiswara dapat melaksanakan berbagai program peningkatan masyarakat di daerah 3T, berfokus pada pembangunan kapasitas, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Khususnya dalam sektor pendidikan yang harus mendapatkan perhatian khusus. Pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara harus dijamin aksesibilitasnya, termasuk bagi masyarakat di daerah 3T sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

Kesenjangan pendidikan di daerah 3T semakin nyata ketika pandemi Covid-19 melanda. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa pendidikan di daerah tersebut memerlukan perhatian khusus, terutama setelah Presiden Republik Indonesia mengumumkan pandemi secara resmi.

Presiden Indonesia saat itu, Ir. H. Joko Widodo, mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia, yang kemudian diikuti dengan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di

seluruh sekolah dan universitas, dimana aktivitas harian beralih dan berpusat pada digitalisasi yang menuntut kecakapan dalam bidang teknologi. Pemberlakuan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung demi meminimalisir penyebaran Covid-19. Di balik urgensi dari pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), menariknya sejumlah media Indonesia menyorot sisi lain yang menyadarkan bahwasanya tidak semua siswa mampu dan mudah dalam mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan metode jarak jauh tersebut (Sholehah et al., 2022).

Berdasarkan pernyataan Presiden Indonesia di atas, pandemi membuka cakrawala sudut pandang pendidikan yang memprihatinkan. Kondisi pendidikan dalam masa pandemi membuka kekurangan dan kesenjangan yang nyata. Oleh karena itu, pandemi membawa segala perubahan dan menuntut penyesuaian radikal bagi kalangan Guru dan peserta didik, tidak terkecuali bagi Widyaiswara yang harus ikut menyesuaikan metode transfer ilmu, mengampu pendidikan dan pelatihan, baik selama pandemi maupun pasca pandemi.

Berbagai permasalahan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan di wilayah terpencil, termasuk minimnya sarana dan prasarana sekolah seperti gedung, alat belajar, institusi pendidikan yang tidak memadai, dan rendahnya kualitas tenaga pendidik. Selain itu, permasalahan lainnya mencakup distribusi tenaga pendidik yang tidak seimbang, rendahnya insentif bagi Guru, kualifikasi yang belum memenuhi standar, penerapan kurikulum yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah, angka putus sekolah masih relatif tinggi, serta pola pembelajaran yang masih konvensional, dimana Guru hanya mengajar melalui ceramah tanpa ada inovasi ataupun modifikasi sistem pembelajaran. Permasalahan tersebut disebabkan tidak ada fasilitas yang memadai untuk menunjang kemajuan proses pembelajaran yang dilakukan, disamping Guru juga mengajar dengan ilmu yang seadanya (Abduh et al., 2022).

Berdasarkan gambaran di atas Widyaiswara (WI) dapat mengambil peran untuk terlibat dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di daerah 3T, dengan menerapkan program-program akselerasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menjembatani kesenjangan pendidikan. Selain itu, peningkatan infrastruktur pendukung, seperti akses internet dan ketersediaan perangkat

teknologi, juga menjadi aspek penting dalam optimalisasi proses pembelajaran. Tantangan lainnya adalah kendala transfer ilmu yang belum optimal antara WI dan Guru di daerah 3T, yang perlu diperkuat melalui kolaborasi dan inovasi dalam sistem pelatihan dan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Syafii (2018) menunjukkan bahwa implementasi wajib belajar di daerah 3T masih mengalami permasalahan, yaitu kurangnya jumlah tenaga pendidik, tingginya angka putus sekolah, rendahnya angka partisipasi sekolah, sarana dan prasarana tidak memenuhi standar pendidikan, serta infrastruktur untuk memudahkan akses dalam mengikuti proses pendidikan masih sangat kurang (Hardiasanti & Trihantoyo, 2021). Merujuk pada pernyataan di atas, dapat dilihat kondisi bahwasanya kondisi pendidikan di daerah 3T dalam kondisi yang kompleks, sehingga perlu disusun program untuk menutup kesenjangan yang telah terjadi. Program tersebut merupakan langkah strategis Widyaiswara dalam mengupayakan dan mendorong pendidikan di daerah agar lebih maju dan berdaya saing.

Program yang Ditawarkan

Program yang dapat dilaksanakan oleh Widyaiswara dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan sektor pendidikan masyarakat di daerah 3T yaitu melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan SDM khususnya kepada guru dan peserta didik. Program ini bertujuan untuk mendorong pembangunan pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan. Beberapa program yang dapat diterapkan antara lain:

1. Program Sinergi Widyaiswara dan Guru

Sinergi antara Widyaiswara dan Guru di daerah 3T sangat penting untuk mengatasi tantangan pendidikan yang kompleks dan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Widyaiswara dapat memberikan pelatihan intensif dan berkelanjutan kepada Guru di daerah 3T, membantu mereka mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, Widyaiswara dapat berperan sebagai mentor, memberikan bimbingan dan dukungan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan efektif. Kerja sama ini juga mencakup penyediaan materi ajar yang kontekstual dan penerapan teknologi pendidikan yang adaptif. Dengan demikian, sinergi ini dapat meningkatkan kompetensi

profesional Guru, memperbaiki kualitas pembelajaran, serta mengurangi disparitas pendidikan antara daerah 3T dan daerah lainnya.

Kolaborasi antara Widyaiswara dan Guru di daerah terpencil merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu kegiatan kolaboratif yang bisa dilakukan adalah pelatihan bersama yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan lokal. Widyaiswara dapat mengadakan *workshop* intensif selama beberapa hari, di mana Guru-Guru setempat diberikan pembekalan tentang metode pembelajaran inovatif, manajemen kelas yang efektif, serta penggunaan teknologi sederhana. Selama pelatihan, Widyaiswara juga bisa memberikan contoh langsung dan mendampingi Guru dalam praktik mengajar di kelas, sehingga mereka dapat melihat dan menerapkan metode baru tersebut secara langsung.

Dalam upaya mempercepat pemerataan pendidikan nasional, diperlukan reformasi menyeluruh yaitu dengan program *Sustainable Education Best Program* (SEBsP): Upaya pemerataan pendidikan berkelanjutan di daerah 3T. Program ini memberikan solusi terhadap permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Keunggulan program ini adalah tentang kurikulum yang disesuaikan dengan potensi daerah 3T, pendidik yang dibekali dengan keahlian khusus sesuai daerah 3T, sistem pendidikan yang menuntut kreativitas pengajar dan masyarakat setempat, kesejahteraan pendidik yang lebih ditingkatkan daripada pendidik di daerah perkotaan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai serta menciptakan suasana kekeluargaan antar pendidik di daerah 3T (Rosmana et al., 2022).

Widyaiswara, dengan keahlian dan pengalaman mereka dalam pengembangan kompetensi, dapat memberikan pelatihan intensif kepada para Guru di daerah 3T. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti metodologi pembelajaran yang inovatif, pengelolaan kelas yang efektif, dan penggunaan teknologi sederhana yang bisa diadaptasi dengan kondisi setempat. Dengan demikian, para Guru di daerah 3T dapat meningkatkan keterampilan pedagogis, sehingga mampu mengajar dengan lebih efektif dan menarik bagi para siswa. Pada aspek tenaga pengajar, berbagai pelatihan

diselenggarakan demi terwujudnya tenaga pengajar profesional. Evaluasi perlu dilakukan tidak hanya berhenti pada satu pola pelatihan saja tetapi juga berbagai pelatihan agar dapat memenuhi kebutuhan Guru sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta tersedianya Guru yang mampu menjawab kebutuhan zaman (Wardhani & Krisnani, 2020) dalam (Asiska & Nurmahmudah, 2022).

Selain memberikan pelatihan, Widyaiswara juga dapat berperan sebagai mentor yang mendampingi para Guru di daerah 3T dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh. Pendampingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa para Guru tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks nyata di lapangan. Widyaiswara dapat membantu Guru mengatasi tantangan spesifik yang mereka hadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan kondisi geografis yang sulit. Dengan adanya bimbingan langsung dari Widyaiswara, Guru dapat merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran.

Widyaiswara dan Guru di daerah 3T juga dapat mempercepat adopsi teknologi pendidikan yang adaptif. Meskipun daerah 3T seringkali memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi, Widyaiswara dapat membantu Guru memanfaatkan teknologi yang ada dengan cara yang kreatif dan efektif. Misalnya, penggunaan media sosial atau aplikasi pesan untuk berbagi materi ajar dan berkomunikasi dengan siswa di luar jam sekolah. Dengan bimbingan dari Widyaiswara, Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Melalui upaya bersama ini, diharapkan kualitas pendidikan di daerah 3T dapat terus meningkat, mengurangi perbedaan kesenjangan dengan daerah lain, dan membuka peluang yang lebih baik bagi generasi muda di daerah 3T.

Untuk mendukung kolaborasi yang lebih efektif, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menjembatani jarak antara Widyaiswara dan Guru di daerah terpencil. Pembuatan kelompok belajar daring atau forum diskusi *online* yang difasilitasi oleh Widyaiswara memungkinkan Guru-Guru

untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi secara real-time. Widyaiswara dapat mengadakan sesi webinar atau telekonferensi secara berkala untuk memberikan pelatihan tambahan, menjawab pertanyaan, dan memberikan umpan balik. Teknologi ini tidak hanya mengurangi hambatan geografis tetapi juga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik secara lebih luas dan efisien. Dengan demikian, kolaborasi antara Widyaiswara dan Guru dapat terus berjalan meskipun berada di lokasi yang terpencil.

Terakhir, kehadiran Widyaiswara di daerah 3T juga dapat membangun semangat dan motivasi di kalangan Guru dan siswa. Dengan melihat komitmen dan dedikasi Widyaiswara yang bersedia datang ke wilayah mereka, Guru dan siswa dapat merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan prestasi mereka. Widyaiswara dapat menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi Guru dan siswa untuk terus belajar dan berkembang. Selain itu, Widyaiswara juga dapat membangun jaringan kolaborasi antara sekolah di daerah 3T dengan lembaga pendidikan lainnya, sehingga tercipta kesempatan untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan praktik terbaik. Melalui sinergi ini, diharapkan pendidikan di daerah 3T dapat berkembang lebih cepat dan merata, sehingga setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

2. Lokakarya Intensif Guru Daerah 3T

Widyaiswara menyelenggarakan pendampingan intensif bagi Guru dengan fokus pada metode pengajaran inovatif, pengelolaan kelas, dan pengembangan kurikulum berbasis mini proyek. Kolaborasi antara Widyaiswara dan Guru di daerah 3T juga mencakup pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang sesuai dengan konteks lokal. Widyaiswara dapat bekerja sama dengan Guru untuk merancang materi pelajaran yang relevan dan menarik, serta mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum. Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh siswa, tetapi juga membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal. Dengan demikian, siswa di daerah 3T dapat merasa lebih terhubung dengan materi yang mereka pelajari dan lebih termotivasi untuk belajar.

Lokakarya proyek sederhana antara Widyaiswara dan Guru merupakan langkah strategis untuk membekali Guru dengan keterampilan praktis dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek pembelajaran yang efektif. Lokakarya ini diawali dengan sesi pengenalan yang menjelaskan tujuan dan manfaat dari pembelajaran berbasis proyek. Widyaiswara memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep dan prinsip dasar pembelajaran berbasis proyek, termasuk bagaimana proyek dapat memotivasi siswa, meningkatkan keterlibatan mereka, serta mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif.

Selama lokakarya, Widyaiswara mengajak para Guru untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk merancang proyek sederhana yang relevan dengan kurikulum dan konteks lokal mereka. Misalnya, kelompok Guru dapat memilih topik seperti lingkungan, budaya lokal, atau teknologi sederhana. Widyaiswara memandu setiap kelompok dalam menetapkan tujuan pembelajaran, merancang aktivitas proyek, menentukan sumber daya yang diperlukan, serta mengidentifikasi cara-cara untuk menilai hasil proyek. Proses kolaboratif ini memungkinkan para Guru untuk saling bertukar ide dan mendapatkan masukan dari rekan sejawat dan Widyaiswara, sehingga menghasilkan rancangan proyek yang lebih matang dan komprehensif.

Selain perancangan proyek, lokakarya juga mencakup sesi praktik di mana Guru-Guru dapat mencoba menjalankan proyek secara simulasi. Misalnya, jika proyek yang dirancang berkaitan dengan pembuatan taman sekolah, Guru-Guru dapat melakukan langkah-langkah awal seperti perencanaan tata letak taman, pemilihan tanaman, dan pembagian tugas di antara siswa. Widyaiswara memberikan umpan balik langsung selama simulasi ini, membantu Guru mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan solusi praktis. Sesi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri para Guru dalam mengimplementasikan proyek, tetapi juga memberi mereka pengalaman nyata yang dapat mereka terapkan di kelas nanti.

Lokakarya antara Widyaiswara dan Guru merupakan inisiatif penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Dalam lokakarya ini, Widyaiswara berperan sebagai

fasilitator yang memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para Guru dalam berbagai aspek pembelajaran. Kegiatan ini dimulai dengan sesi pembukaan yang menjelaskan tujuan lokakarya, diikuti dengan pemaparan materi oleh Widyaiswara seperti teknik pengelolaan kelas yang efektif dan strategi penilaian yang holistik. Para Guru diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya, sehingga tercipta interaksi yang dinamis.

Selama lokakarya, Widyaiswara mengajak para Guru untuk terlibat dalam berbagai aktivitas praktis dan simulasi yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Misalnya, Guru dapat berpartisipasi dalam kelompok kerja untuk merancang rencana pembelajaran berbasis proyek sederhana. Proyek sederhana ini disusun guna dapat diimplementasikan di setiap kelas-kelas didikan. Misalnya, perpustakaan digital, alat peraga, dan fasilitas penunjang yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan keterampilan praktis para Guru, tetapi juga mendorong mereka untuk berkolaborasi dan berbagi ide dengan rekan sejawat. Selain itu, Widyaiswara juga memberikan umpan balik konstruktif yang membantu Guru mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.

Lokakarya ini juga mencakup sesi khusus yang membahas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Widyaiswara menunjukkan cara-cara kreatif untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses mengajar, bahkan di daerah dengan keterbatasan akses. Para Guru diajarkan untuk memanfaatkan perangkat sederhana seperti *smartphone* atau tablet untuk membuat konten edukasi atau menggunakan aplikasi pendidikan yang dapat diakses secara offline. Melalui sesi ini, Guru-Guru diharapkan dapat lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi sebagai alat bantu mengajar yang dapat meningkatkan interaksi dan motivasi belajar siswa.

Pada akhir lokakarya, Widyaiswara dan Guru melakukan evaluasi bersama untuk menilai efektivitas kegiatan dan menentukan langkah-langkah lanjutan yang perlu diambil. Evaluasi ini melibatkan refleksi individu dan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi pencapaian, tantangan yang dihadapi, dan strategi perbaikan yang dapat diterapkan. Hasil dari evaluasi ini kemudian dirumuskan

menjadi rencana tindak lanjut yang konkret, seperti program pendampingan berkelanjutan atau penyelenggaraan lokakarya lanjutan. Dengan demikian, lokakarya ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi para Guru, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk terus berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing.

3. Widyaiswara Mengajar di Daerah 3T (WM-3T)

Program WM-3T merupakan sebuah program terobosan dalam upaya pemerataan pendidikan berkelanjutan di daerah 3T. Program ini dapat diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dikhususkan bagi WI untuk mengabdikan dan berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) (Undang. Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2023, 2023) Dimana di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Pegawai ASN berfungsi sebagai a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa.

Melihat Pasal 10 UU ASN di atas dapat dinyatakan bahwa WI sebagai ASN harus menjadi bagian sebagai pelayan publik dalam hal ini memberikan transfer ilmu di daerah 3T. WI dituntut memberikan pengabdian di bidang pendidikan dan pelatihan di daerah 3T. Selain itu, fungsi WI juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dengan kata lain, WI harus dapat berpartisipasi sebagai jembatan ilmu di daerah 3T sehingga kesenjangan pendidikan dapat diminimalisir antara pusat kota dan daerah 3T. Program WM-3T dapat diselenggarakan dengan berdasarkan komitmen antara Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah khususnya instansi terkait yang menGurusi di bidang pendidikan.

Target program WM-3T ini adalah sekolah-sekolah dasar di daerah 3T dan menjadi bagian dari pelaksanaan program kepada perangkat sekolah beserta unsur pihak-pihak terkait. Program dapat dilaksanakan melalui 3 tahap dasar yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Program WM-3T dapat berkoordinasi antar instansi untuk menjalankan program berkelanjutan ini dapat dijabarkan antara lain:

1. Lembaga Pendidik dimana WI bernaung atau tempat yang menjadi basecamp para WI menyusun program kegiatan dasar pendidikan. Konten dokumen penyusunan secara umum dapat berupa tema kegiatan pendidikan, tema bahan ajar, target peserta dan instansi sekolah yang dituju;
2. Bangun komunikasi dan komitmen bersama instansi terkait. Komitmen dapat berupa Kerjasama atau nota kesepahaman dalam rangka upaya peningkatan kualitas pendidikan;
3. Lembaga Pendidikan membentuk tim WI yang akan diterjunkan ke daerah 3T;
4. Tim WI yang telah ditentukan dapat disesuaikan dengan jumlah kebutuhan.
5. Tim WI turun langsung ke lapangan untuk mengajar secara klasikal kepada peserta didik dan didampingi oleh Guru-Guru dan perangkat sekolah yang dikenal dengan istilah sit-in. sit-in ini adalah metode sederhana kepada Guru-Guru dan perangkat sekolah guna menyaksikan, mengamati, dan memperhatikan secara langsung proses transfer ilmu dengan metode-metode kreatif.

Berdasarkan penjabaran langkah-langkah di atas, WI yang berpartisipasi dalam program WM-3T dapat membuat rencana pembelajaran sederhana dan bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah-sekolah dasar. Bahan ajar yang disusun diharapkan dapat menggugah dan menginspirasi bagi-bagi anak sekolah dasar. Seperti misalnya, mata pelajaran berhitung dikemas ke dalam berhitung dengan alat peraga dimana alat peraga dapat berupa fisik maupun digital.

Selain pelatihan formal, kolaborasi dapat diperkuat melalui pendampingan berkelanjutan. Widyaiswara dapat melakukan kunjungan rutin ke sekolah-sekolah di daerah terpencil untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada Guru-Guru. Kunjungan ini memungkinkan Widyaiswara untuk memantau perkembangan dan tukar pikiran yang konstruktif kepada para Guru. Selain itu, Widyaiswara bisa membantu Guru-Guru dalam mengembangkan rencana pelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan lingkungan sekitar, serta menyediakan sumber daya dan materi ajar yang dibutuhkan. Pendekatan ini memastikan bahwa Guru-Guru tidak hanya mendapatkan

teori, tetapi juga bimbingan praktis yang berkelanjutan.

Kehadiran Widyaiswara yang mengajar langsung di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) membawa dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, Widyaiswara dapat langsung berinteraksi dengan Guru dan siswa, memberikan bimbingan serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik di lapangan. Widyaiswara dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Guru dalam proses mengajar dan memberikan solusi praktis yang dapat diimplementasikan segera. Pendekatan ini memastikan bahwa pelatihan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dan relevan dengan konteks lokal.

Selama berada di daerah 3T, Widyaiswara dapat mengadakan sesi observasi kelas untuk memahami dinamika pembelajaran dan interaksi antara Guru dan siswa. Melalui observasi ini, Widyaiswara dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada Guru tentang metode pengajaran yang efektif, pengelolaan kelas, serta strategi untuk meningkatkan partisipasi siswa. Selain itu, Widyaiswara juga dapat mempraktikkan langsung teknik-teknik pembelajaran inovatif di kelas, sehingga Guru dapat melihat dan belajar secara langsung bagaimana metode tersebut diterapkan. Pendekatan hands-on ini membantu Guru untuk lebih mudah mengadopsi dan mengadaptasi teknik-teknik baru dalam pengajaran mereka.

Penggunaan teknologi pendidikan juga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa di sekolah dasar. Widyaiswara dapat memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran interaktif dan media digital untuk menyampaikan materi dengan cara yang menarik. Misalnya, menggunakan video dan animasi untuk menjelaskan konsep-konsep matematika sederhana, membangun konsep berbahasa yang baik dan benar, contoh perilaku, tata krama dan sopan santun serta kehidupan keseharian yang dapat dipraktekkan langsung.

Diharapkan dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran, Widyaiswara dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan interaktif, dan membantu siswa sekolah-sekolah dasar mengembangkan keterampilan perilaku bahkan literasi digital

dapat meningkat sehingga dapat merubah paradigma berpikir dan cakrawala pengetahuan yang berkembang bagi masa depan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Widyaiswara berperan penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi tenaga pendidik dan peserta didik melalui program pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan pendidikan. Disisi lain, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, akses transportasi, serta pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kondisi dan budaya lokal.

Saran

1. **Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan:** Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih berkelanjutan dengan menyesuaikan kebutuhan daerah 3T, termasuk penyediaan infrastruktur pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta penguatan peran Widyaiswara dalam pelatihan dan pendampingan.
2. **Peningkatan Kolaborasi:** Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, serta sektor swasta dalam mendukung pengembangan pendidikan di daerah 3T. Program-program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan perlu diperluas guna menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.
3. **Optimalisasi Teknologi Pendidikan:** Implementasi teknologi dalam pembelajaran di daerah 3T perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi untuk menyediakan akses internet dan perangkat pembelajaran yang lebih baik bagi tenaga pendidik dan peserta didik.
4. **Peningkatan Insentif bagi Widyaiswara dan Guru di Daerah 3T:** Untuk meningkatkan motivasi tenaga pendidik dan Widyaiswara yang bertugas di daerah 3T, perlu adanya insentif khusus, baik dalam bentuk tunjangan finansial maupun kesempatan pengembangan karier.
5. **Penelitian dan Evaluasi Berkelanjutan:** Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas program Widyaiswara dalam meningkatkan

pendidikan di daerah 3T. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., Basiru, A. A., Narayana, M. W., Safitri, N., & Fauzi, R. (2022). Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Kampung Manceri Cigudeg Kabupaten Bogor. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 291–300. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1364>
- Andi Nur fadillah, Suljumansah, M. (2021). Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Terpencil (Studi Kasus pada SD Inpres Ampiri Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru). *YUME : Journal of Management*, 4(3), 547–555. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.436>
- Asiska, I., & Nurmahmudah, F. (2022). Pengelolaan Tenaga Pendidikan di Daerah 3T SMP Negeri 1 Maratua. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 7124–7131.
- Faruqi Tutukansa, A., & Dwi Tuffahati, E. (2022). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua Sebagai Daerah 3T Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(2), 84–92. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss2.art4>
- Hardiasanti, M., & Trihantoyo, S. (2021). Implementasi Wajib Belajar Di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(05), 1064–1077.
- Kemensesneg. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. *Kementerian Sekretariat Negara*, 018390, 1–8. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176108/Perpres_Nomor_63_Tahun_2020.pdf
- Kuliawati, & Radjasa. (2019). Pendidikan Dasar pada Daerah Tertinggal (Studi di SDN Inpres Kecil). *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 14(1), 11–14.
- Maulido, S., Karmijah, P., & Rahmi, V. (2024). Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Di Daerah Terpencil. *Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 3021–3777. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i1.488>
- Putera, M. T. Fi., & Rhussary, M. L. (2018). Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3T. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 12(2), 144–149.
- Rahmadi Fitri Imam. (2020). Pendidikan di Daerah Kepulauan Terpencil, Potret Siswa, Guru, Dan Sumber Belajar. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(1), 75–84.
- Rira, P. (2023). Revitalisasi Peran Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Wilayah 3T. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 1(2), 354–363.
- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fadilah, N., Azhar, N., Oktavini, D., & Munte, A. C. (2022). Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan di Daerah 3T. *Journal of Elementary Education*, 6(2), 405–418.
- Sholehah, I., Puttradi, A. W. A., & Hum, M. (2022). Program Kampus Mengajar: Upaya Pemerataan Pendidikan di Wilayah 3T pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 3(1), 37–44.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). *Raja Grafindo Persada*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 (2023).
- Yaya Jakaria, Imelda Widjaja, Ika Hijriani, Panca Waluyo, Khairur Raziqin, D. (2019). *Pendidikan di Daerah 3T Diprioritaskan*. 133. <https://www.kompas.id/baca/lain-lain/2017/11/04/pendidikan-di-daerah-3t-diprioritaskan>